

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI KECAMATAN KLAMPIS, KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2018-2021**

Suciati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Suciati189@gmail.com

Dr. Ontot Murwato S.,Drs.,MM.,Ak.,CA.,CMA.,CPA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ontotms@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dengan tujuan menganalisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan kinerja keuangan belanja daerah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021. Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik dokumentasi merupakan teknik yang diterapkan untuk pengambilan data. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2018-2021 merupakan data sekunder yang diaplikasikan dalam penelitian ini yang dengan output: Kinerja keuangan pendapatan daerah di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021, Kecamatan Klampis merupakan salah satu unit dari Kabupaten Bangkalan yang hanya melaporkan beban-beban yang disusun ke dalam laporan realisasi APBD kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, maka dari itu tahun anggaran 2018-2021 tidak terdapat sumber pendapatan selain pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Bangkalan, sehingga tidak bisa menerapkan rumus-rumus yang di dalamnya terdapat data pendapatan. Sedangkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021 dapat dikatakan baik. Sehingga dapat diartikan bahwa semua bagian belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal menunjukkan efisiensi belanja. Meskipun masih terdapat realisasi belanja yang melebihi dari target yang dianggarkan. Rasio belanja modal lebih kecil dibandingkan rasio belanja operasi karena dana dari jumlah belanja daerah lebih banyak diberikan untuk belanja operasional daripada modal belanja.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Analisis Rasio Keuangan

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of regional revenues and the financial performance of regional expenditures in Klampis District, Bangkalan Regency for the 2018-2021 Fiscal Year. This research is a qualitative research with case study method. Documentation technique is a technique used for data collection. The report on the realization of the regional income and expenditure budget, Klampis Subdistrict, Bangkalan Regency for the 2018-2021 Fiscal Year is secondary data used in this study. With the results of the study which shows that: Financial Performance of Regional Revenues in Klampis District, Bangkalan Regency for the 2018-2021 Fiscal Year, Klampis District is one of the units from Bangkalan Regency which only report expenses compiled into the APBD report and then submitted to the regional government, therefore for the 2018-2021 fiscal year there are no sources of income other than income obtained from Bangkalan Regency, so it cannot apply the formulas in which there is income data. Meanwhile, the Financial Performance of Regional Expenditure in Klampis District, Bangkalan Regency for the 2018-2021 Fiscal Year can be said to nice. So that it can be interpreted that all components of expenditure, both operating expenditure and capital expenditure, show spending efficiency. The capital expenditure ratio is smaller than the operating expenditure ratio because more funds from the total regional expenditure are allocated to operating expenditures than capital expenditures.

Keyword: Financial Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget, Financial Ratio Analysis

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan kerugian yang sangat substansial terhadap sektor sosial yaitu dalam bidang kesehatan dan juga menimbulkan kerugian terhadap sektor ekonomi. Aktivitas pada sektor ekonomi pun turut mengalami dampak akibat pandemi ini. Pemerintah Daerah Kabupaten diberi hak dan kewajiban untuk mengatur perencanaan penyusunan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan sesuai dengan kebutuhan kemampuan dari daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi terutama di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan, dengan ini berdampak pada stabilitas sistem keuangan daerah. Perbandingan antara belanja daerah serta anggaran pendapatan pada periode 2018-2021 pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran 2019-2021

URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	APBD 2021
Pendapatan	2.368.142.830.019,56	2.107.651.013.126,24	2.223.065.078.005,00
Belanja	2.482.058.436.770,46	2.212.258.831.965,20	2.287.328.858.005,00
Penerimaan Pembiayaan	136.685.446.361,89	108.750.833.507,96	89.013.780.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	22.769.839.611,00	4.143.014.678,00	24.750.000.000,00

Berdasarkan data diatas pendapatan serta belanja daerah pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan pada kedua topik tersebut semakin rendah. Sedangkan pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2020. Hal ini membuktikan bahwa tingkat penanganan pendapatan daerah dan belanja daerah semakin tinggi.

Penerapan rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji hasil dari performa belanja daerah serta keuangan anggaran pendapatan pada suatu pemerintah daerah. Metode tersebut diantaranya adalah rasio derajat, rasio efisiensi belanja daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dll.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menerapkan rasio keuangan untuk menganalisa performa keuangan serta analisa keuangan belanja pada Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021. Sehingga dapat dipertimbangkan dalam membuat keputusan pemerintah daerah khususnya Kecamatan Klampis untuk menetapkan kebijakan serta membuat strategi untuk perbaikan sistem keuangan pada periode berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Belinda, P, A & Costari, N (2021;61) Akuntansi sektor publik merupakan suatu metode yang biasa di pakai dalam suatu intuisi yang meliputi pengelompokan, penyusunan, penggolongan serta penguraian yang memiliki output berupa laporan keuangan dalam suatu institusi, yang menyimpan informasi

keuangan kepada yang membutuhkan dalam mengambil suatu keputusan. Akuntansi sektor publik yaitu data maupun laporan yang digunakan suatu intitusi sebagai manajemen dan sebagai tempat penjelasan bagi publik. Mardiasmo (2018;2). Akuntansi sektor publik merupakan sektor publik yang beroperasi dalam ruang lingkup sektor perdagangan, sektor kebudayaan dan politik adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi sektor publik. Setiyani, E, R & Nurfadila, R (2021;74)

Kinerja Keuangan

Menurut Ratningsih dan Tuti Alawiyah (2017;17) Kinerja Keuangan yaitu suatu kondisi keuangan perusahaan dalam suatu tahun anggaran yang dihitung dengan indikator keseluruhan aktiva, likuiditas, dan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Kinerja Keuangan adalah suatu penguraian dalam menilai perusahaan yang sudah menerapkan aturan-aturan manifestasi keuangan secara kompeten. Aisyah (2017;22). Kinerja Keuangan daerah memiliki arti sebagai kekuatan dalam mengelola serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poyoh & dkk (2017;746).

Anggaran Pendapatan Daerah

Menurut Yuliasati K (2017;161) Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang didapatkan melalui retribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Efektivitas anggaran harus diperhatikan dalam pengendalian tingkat efisiensi, hal yang harus diperhatikan pada perencanaan anggaran ialah:

1. Merincikan dengan jelas dari indikator, sasaran, manfaat, hasil dan tujuan dari output yang ingin diraih.
2. Menentukan prioritas aktivitas berupa menetapkan harga satuan yang wajar serta perhitungan beban kerja yang ada.

Anggaran Belanja Daerah

Menurut Habiburrahman (2016;126) Belanja Daerah merupakan jumlah beban yang dapat mengurangi modal selama satu periode. Belanja Daerah terdiri dari tiga kategori diantaranya:

- a. Belanja Aparatur Daerah, adalah pengeluaran daerah yang berfokus pada kebutuhan aparatur daerah.
- b. Belanja Pelayanan Publik, adalah pengeluaran daerah yang berfokus terhadap kualitas layanan terhadap masyarakat.
- c. Bantuan Keuangan serta Belanja Bagi Hasil.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Barus & dkk (2017;156) Rasio Keuangan ialah suatu teknik yang dipakai dalam menjelaskan uraian dari keuangan pada suatu perusahaan sehingga dapat dianalisa tentang kesehatan keuangan pada perusahaan tersebut.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian merupakan metode untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola semua keuangan untuk segala keperluan yang ada. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan: Sumber Mahmudi (2019;140)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Pada tabel berikut merupakan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Persentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,00-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM, (1991)

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Fiskal adalah metode yang menjadi tolak ukur yang merepresentasikan posisi taraf kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Apabila pendapatan daerah tersebut semakin banyak maka penguasaan pemerintah daerah akan semakin tinggi. Berikut adalah rumus dalam menentukan derajat desentralisasi fiskal: Sumber Mahmudi (2019;140)

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efektivitas PAD :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	00,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Cukup
4	30,01-40,00	Sedang
5	40,01-50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, (1991)

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas yaitu suatu tolak ukur antara sasaran penerimaan PAD dengan sasaran penerima pendapatan asli daerah untuk menilai performa atau kemampuan pemerintah daerah. Sumber Mahmudi (2019;141)

Rumus dibawah ini untuk menghitung rasio efektivitas PAD:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel berikut adalah kriteria dalam menilai kinerja atau kemampuan pemerintah daerah:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas PAD

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
1	100% Ke atas	Sangat Efektif
2	100%	Efektif
3	90%-99%	Cukup Efektif
4	75%-89%	Kurang Efektif
5	Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, (1996)

c. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi merupakan metode untuk menilai anggaran pemerintah, apakah sudah sesuai dengan efisiensi yang diperlukan. Output dari penilaian ini memiliki sifat tidak mutlak melainkan memiliki sifat relatif. Dikatakan efisien apabila rasio efisiensinya $\leq 100\%$, namun apabila rasionya $\geq 100\%$ maka anggaran tersebut mengalami pemborosan. Berikut adalah cara yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi: Mahmudi (2019;164)

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian merupakan suatu gambaran tentang pembagian dana pada belanja modal dan belanja operasi agar berjalan secara maksimal. Apabila pemerintah daerah tersebut memiliki pendapatan yang rendah maka ditekankan untuk lebih aktif dalam menggunakan modal belanja yang berfungsi sebagai aset jangka panjang, namun apabila pendapatan pemerintah tinggi, maka modal investasi yang dimiliki sudah melebihi sasaran. Menurut Mahmudi (2019;162) Rasio Keserasian mendefinisikan sebagai berikut:

Rasio belanja operasi adalah suatu cara untuk mengukur belanja operasi dengan hasil pembelanjaan daerah. Biasanya perbandingan keseluruhan kedua hal tersebut berkisar 60%-90%. Adapun cara menghitung rasio tersebut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal adalah suatu cara untuk mengukur modal belanja dengan hasil pembelanjaan daerah. Biasanya perbandingan keseluruhan kedua

hal tersebut berkisar 5%-20%. Rasio belanja modal dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif menggunakan metode studi kasus. Untuk menilai kinerja belanja daerah dan kinerja pendapatan anggaran Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan pada periode 2018-2021 yaitu menerapkan rasio keuangan yang meliputi rasio efisiensi belanja daerah, rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi belanja daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio keserasian belanja daerah pada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapat dari kumpulan laporan realisasi dari belanja daerah, anggaran pendapatan dan arsip-arsip resmi yang terdapat di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

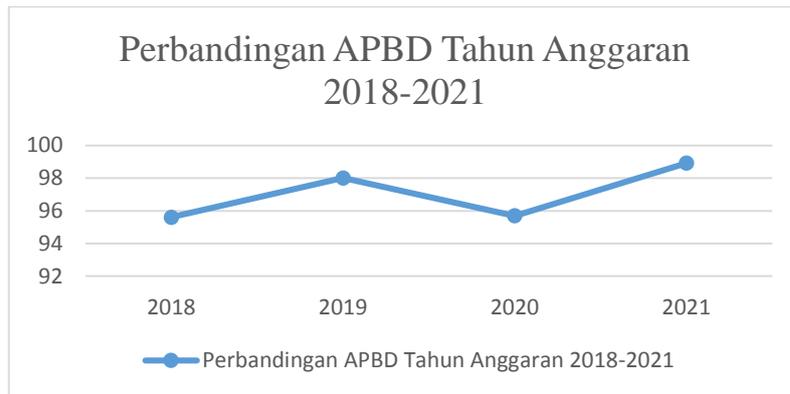
HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021

Di dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kantor Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2018-2021 tidak terdapat sumber pendapatan selain pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Bangkalan, dan berikut merupakan laporan keuangan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2021

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2018	Rp. 2.928.312.100,-	Rp. 2.799.832.451,-	95,61
2019	Rp. 2.905.395.179,-	Rp. 2.847.439.411,-	98,01
2020	Rp. 2.811.139.561,-	Rp. 2.690.190.242,-	95,70
2021	Rp. 2.434.257.350,-	Rp. 2.407.928.928,-	98,92



Gambar 1. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2021

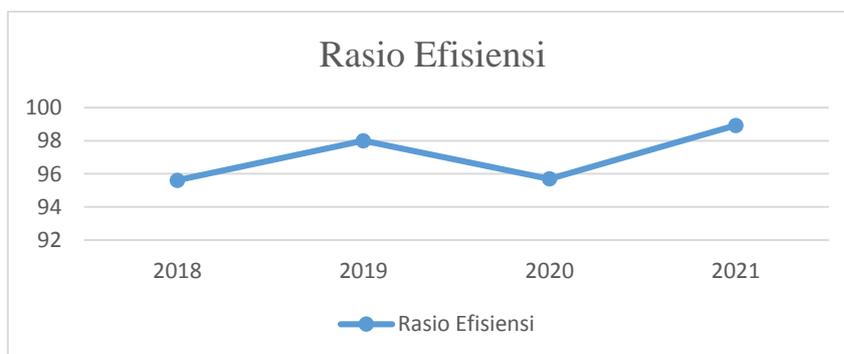
Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2018, sedangkan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19, tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan karena pandemi Covid-19 sudah mulai mereda.

a. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Dibawah ini adalah hasil analisis efisiensi belanja daerah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021:

Tabel 6. Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2021

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	RASIO EFISIENSI (%)	KRITERIA
2018	Rp. 2.928.312.100,-	Rp. 2.799.832.451,-	95,61	Efisien
2019	Rp. 2.905.395.179,-	Rp. 2.847.439.411,-	98,00	Efisien
2020	Rp. 2.811.139.561,-	Rp. 2.690.190.242,-	95,70	Efisien
2021	Rp. 2.434.257.350,-	Rp. 2.407.928.928,-	98,92	Efisien



Gambar 2. Rasio Efisiensi Belanja Daerah 2018-2021

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Klampis Tahun Anggaran 2018-2021 rasio efisiensinya senilai kurang dari 100% yang termasuk dalam kriteria efisien. Akan tetapi masih ada realisasi di bagian pembelanjannya melebihi anggaran yang telah ditetapkan, maka dari hal tersebut membuat menjadi tidak efisien.

b. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Dibawah ini adalah hasil analisis keserasian belanja daerah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021:

Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Belanja Operasi Terhadap Jumlah Belanja Daerah	Belanja Modal Terhadap Jumlah Belanja Daerah	Rasio Keserasian	
			Belanja Operasi	Belanja Modal
2018	Rp. 2.676.464.351,-	Rp. 123.368.100,-	95,59%	4,41%
	Rp. 2.799.832.451,-	Rp. 2.799.832.451,-		
2019	Rp. 2.800.689.411,-	Rp. 46.750.000,-	98,36%	1,64%
	Rp. 2.847.439.411,-	Rp. 2.847.439.411,-		
2020	Rp. 2.687.690.242,-	Rp. 2.500.000,-	99,91%	0,09%
	Rp. 2.690.190.242,-	Rp. 2.690.190.242,-		
2021	Rp. 2.271.928.928,-	Rp. 136.000.000,-	94,35%	5,65%
	Rp. 2.407.928.928,-	Rp. 2.407.928.928,-		



Gambar 3. Rasio Keserasian Belanja Daerah 2018-2021

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021 rasio belanja modal lebih kecil dibandingkan rasio belanja operasi karena dana dari jumlah belanja daerah lebih

banyak dialokasikan untuk pengeluaran operasional daripada belanja modal. Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah antara 60%-90% atau kurang dari 100%. Sedangkan rasio modal belanja pada total belanja daerah, yaitu berkisar 5-20%. Yang berarti dana dialokasikan pada satu periode anggaran untuk belanja yang bersifat waktu yang singkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan, hasil serta tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021

Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2018-2021 tidak terdapat sumber pendapatan selain pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu, peneliti tidak dapat menerapkan rumus-rumus rasio keuangan karena tidak terdapat data realisasi penerimaan PAD, pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, pendapatan transfer, serta target penerimaan PAD.

2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021

Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021 yaitu dapat dikatakan baik.

- a. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021, Rasio efisiensi belanja daerah: senilai kurang dari 100% yang termasuk dalam kriteria efisien. Akan tetapi masih ada pembelanjaan yang melebihi dari target realisasi yang harusnya dianggarkan maka dari itu yang menyebabkan ketidak efisiensinya.

- b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021, Rasio keserasian belanja daerah: Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2021 rasio belanja modal memiliki nilai lebih kecil dibandingkan rasio belanja operasi karena belanja daerah memiliki jumlah dana yang lebih besar

sehingga dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah, yaitu antara 60%-90% atau kurang dari 100%. Sedangkan rasio belanja modal terhadap belanja daerah, yaitu antara 5%-20%. Yang berarti dana yang diberikan dalam satu tahun anggaran untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dan sifatnya jangka pendek.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut merupakan beberapa saran yang dapat diterapkan pada pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Penambahan pengukuran terhadap rasio, sehingga hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini bisa lebih akurat.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis kinerja keuangan dengan periode lebih dari 4 tahun anggaran.
3. Peneliti diharapkan untuk lebih memperluas lingkup wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2017;22). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Manajemen*, 21-25.
- Badan Lembaga Depdagri RI & FISIPOL-UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Barus, M. A., Sudjana, N., & Sulasmiyati, S. (2017;156). Penggunaan Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 154-163.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021;61). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 61.
- Depdagri. 1997. Kemendagri No. 690.900.327, (1996). *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Habiburrahman, (2016;126). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 120-134.
- Mahmudi. (2019;164). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahmudi. (2019;140). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019;141). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019;162). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018;2). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Poyoh, C, M., & dkk. (2017;746). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, V, 745-752.
- Ratningsih, & Alawiyah, T. (2017;17). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas Pada PT Bata Tbk. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 14-27.
- Setiyani, E. R., & Nurfadila, R. (2021;74). Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, Vol. 1. No. 2*, 72-82.
- Yuliastati, K. (2017;161). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *E-Jurnal Katalogis*, 160-171.